Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat	e ISSN : 2581-1126 p ISSN : 2442-448X	Vol 7, No: 1	Hal: 100 - 115	April 2020
---	--	--------------	----------------	------------

PERNIKAHAN DINI DAN PEMBANGUNAN DAERAH

Tahira Nurul Azizah¹ Nunung Nurwati²

^{1,2}Mahasiswa Departemen Kesejahteraan Sosial FISIP-UNPAD

¹*tahira18001@unpad.mail.ac.id*, ²*nngnurwati@yahoo.co.id*

ABSTRAK

Pembangunan daerah dan kualitas penduduk merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Kualitas penduduk dapat menunjukkan tingkat pertumbuhan dari suatu daerah. Karena itulah, Pemerintah mencetuskan kebijakan mengenai pembangunan daerah yang berkelanjutan dan kualitas penduduk. Salah satu problematika yang dapat menunjukkan kualitas penduduk yang ada di suatu tempat adalah pernikahan dini. Menurut data BPS, angka pernikahan dini mencapai 15,66% tahun 2018. Terjadinya pernikahan dini dapat menunjukkan tingkat Pendidikan, ekonomi, dan social budaya sebuah daerah. Pernikahan menjadi masalah kompleks kependudukan yang dapat mempengaruhi pertumbuhan suatu daerah berjalan. Pemerintah Indonesia sendiri menetapkan bahwa angka pernikahan dini dapat menunjukkan tingkat pertumbuhan suatu daerah berjalan. Oleh karena itu, melalui jurnal ini akan dibahas mengenai hubungan antara pernikahan dini dengan kualitas penduduk dan pengaruhnya pada pembangunan daerah.

Kata kunci: kualitas penduduk, pernikahan dini, pembangunan daerah

ABSTRACT

Regional development and population quality are two things that cannot be separated. Quality of population can indicate the level of growth of an area. For this reason, the Government adopted policies regarding sustainable regional development and the quality of the population. One problem that can show the quality of the population that exists in a place is early marriage. According to BPS data, the number of early marriages reaches 15.66% in 2018. The occurrence of early marriages can indicate the level of education, economy, and social culture of a region. Marriage becomes a complex population problem that can affect the growth of a walking area. The Indonesian government itself stipulates that the rate of early marriage can indicate the growth rate of an ongoing region. Therefore, through this journal we will discuss the relationship between early marriage and the quality of the population and its influence on regional development.

Keywords: population quality, early marriage, regional development

PENDAHULUAN

Kependudukan

Ketika membicarakan manusia, maka topik yang diangkata sangatlah banyak, Hal ini dikarenakan manusia memiliki hubungan yang beragam baik antar manusia maupun lingkungan atau wilayahnya. Hal inilah yang memunculkan bahasan mengenai kependudukan.

Kependudukan berasal dari kata penduduk yang dapat diartikan warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Jadi, kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, umur,

jenis kelamin, agama, kelahiran, perkawinan, kehamilan, kematian, persebaran, mobilitas dan kualitas serta ketahanannya yang menyangkut politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Ilmu yang mempelajari hal ini biasa disebut dengan studi kependudukan atau biasa disebut dengan demografi.

Demografi berasal dari bahas Yunani yaitu *demos* dan *graphein*. *Demos* diartikan sebagai penduduk, dan *graphein* berarti menulis. Dengan menggabungkan kedua makna dari kata-kata tersebut maka dapat diartikan kata demografi berarti tulisan-tulisan atau karangan-karangan

Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat	e ISSN : 2581-1126 p ISSN : 2442-448X	Vol 7, No: 1	Hal: 100 - 115	April 2020
---	--	--------------	----------------	------------

tentang penduduk suatu negara atau suatu daerah.

Lebih lanjut, beberapa ahli mengemukakan pengertiannya mengenai demografi antara lain:

1. Achille Guillard (1855)

Ia mendefinisikan demografi didefinisikan sebagai ilmu mempelajari segala sesuatu dari keadaan dan sikap manusia yang dapat diukur yaitu meliputi perubahan secara umum, fisiknya, peradabannya, intelektualitasnya, dan kondisi moralnya.

2. G.W Barclay (1970)

Gambaran secara numerik /statistik tentang penduduk. Penduduk/population adalah satu kesatuan dari manusia yang diwakili oleh suatu nilai statistik tertentu. Oleh karena itu demografi berhubungan dengan tingkah laku penduduk secara keseluruhan/ bukan perorangan.

3. Phillip M. Hauser dan Otis Dudley Duncan (1959)

Demografi merupakan ilmu yang mempelajari jumlah, persebaran teritorial, komposisi penduduk, serta perubahannya dan sebab-sebab perubahan tersebut, dimana sebab-sebab perubahan tersebut yang biasanya timbul karena natalitas/fertilitas, mortalitas, gerak teritorial (migrasi) dan mobilitas sosial (perubahan status).

4. David V. Glass (1953)

Menekankan bahwa demografi terbatas pada studi penduduk sebagai akibat pengaruh dari proses demografi, yaitu fertilitas, mortalitas, dan migrasi.

5. United Nation (1958) dan International Union for the Scientific Study of Population/IUSSP (1982)

Demografi adalah studi ilmiah masalah penduduk yang berkaitan dengan jumlah, struktur, serta pertumbuhannya. Masalah demografi lebih ditekankan pada studi kuantitatif dari berbagai faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk yaitu fertilitas, mortalitas, dan migrasi.

Sehingga dapat disimpulkan, ilmu demografi adalah alat untuk mempelajari perubahan dalam populasi menggunakan data statistik dan perhitungan matematika pada perubahan jumlah penduduk, distribusi, dan komposisi / struktur. Perubahan tersebut dipengaruhi oleh perubahan komponen utama dari pertumbuhan penduduk yang fertilitas, mortalitas dan migrasi yang pada

gilirannya dapat menyebabkan perubahan kuantitas, struktur dan distribusi populasi.

Demografi memberikan pandangan yang komprehensif dari perilaku penduduk, baik dalam agregat atau kelompok. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa demografi adalah ilmu yang membahas mengenai populasi penelitian struktur dan proses penduduk di suatu daerah. Struktur penduduk meliputi jumlah, distribusi, dan komposisi penduduk. Struktur ini penduduk dalam perubahan konstan dan perubahan.

Ketika memahami studi kependudukan, maka hal yang termasuk didalamnya adalah masalah kependudukan. Masalah kependudukan telah menjadi bahasan para filsuf dan cendekiawan sejak berates-ratus tahun lalu.

Masalah kependudukan di Indonesia sangatlah beragam. Mulai dari pengangguran, angka persebaran penduduk yang tidak merata, angka kelahiran muda, angka penderita hiv dan AIDS hingga pernikahan dini. Masalah ini masuk dalam bahasan demografi karena berhubungan dengan kependudukan.

Pernikahan

Masalah kependudukan sangatlah banyak jenisnya juga factor pendorongnya. Banyak hal-hal yang mendukung munculnya masalah kependudukan dan mengaggun kestabilan penduduk yang mendiami suatu daerah. Hal-hal yang mempengaruhi tersebut berasal dari berbagai sector yang berhubungan dengan perkembangan manusia itu sendiri. Salah satu masalah kependudukan yang sangat kompleks adalah pernikahan dini.

Beberapa arti menjabarkan mengenai perngertian pernikahan antara lain:

1. Menurut Tahlil (1980) Pernikahan adalah satu perjanjian suci kuat dan kukuh untuk hidup bersama secara sah antara seorang lelaki dengan seorang wanita untuk membentuk keluarga yang kekal, santun-menyantuni, kasih-mengasihi, aman dan Bahagia.

2. Kartono (1992) mendefinisikan pernikahan sebagai suatu institusi sosial yang diakui disetiap kebudayaan atau masyarakat. Sekalipun makna pernikahan berbeda-beda, tetetapi praktek-prakteknya pernikahan dihampir semua kebudayaan cenderung sama pernikahan menunjukkan pada suatu peristiwa saat sepasang calon suami-istri dipertemukan secara formal dihadapan ketua agama, para saksi, dan sejumlah

Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat	e ISSN : 2581-1126 p ISSN : 2442-448X	Vol 7, No: 1	Hal: 100 - 115	April 2020
---	--	--------------	----------------	------------

hadirin untuk kemudian disahkan secara resmi dengan upacara dan ritual-ritual tertentu.

3. Terruwe mendefinisikan pernikahan sebagai persatuan dimana tercipta karena adanya cinta dan dukungan yang diberikan oleh suami kepada istri dan begitu pula sebaliknya.

4. Duvall dan Miller (dalam Hasanah, 2012) mengartikan pernikahan sebagai hubungan antara pria dan wanita dan diakui dalam masyarakat yang melibatkan hubungan seksual, kontrol mereka dan hak-hak pengasuhan, serta pemahaman terhadap tugas masing-masing sebagai suami dan istri.

5. Sigelman, (dalam Hazairin, 1963) mendefinisikan perkawinan sebagai sebuah hubungan antara dua orang yang berbeda jenis kelamin dan dikenal dengan suami istri. Dalam hubungan tersebut terdapat peran serta tanggung jawab dari suami dan istri yang didalamnya terdapat unsur keintiman, pertemanan, persahabatan, kasih sayang, pemenuhan seksual, dan menjadi orang tua.

6. Undang-Undang No 1 Tahun 1974 pasal 1 tentang Pernikahan, mendefinisikan pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dari beberapa pengertian ini, dapat dipahami bahwa pernikahan merupakan hubungan yang terdapat didalamnya koneksi internal dan eksternal antara laki-laki dan wanita sebagai suami dan istri yang memiliki kekuatan hukum dan diakui sosial dalam rangka untuk membentuk sebuah keluarga sebagai satu set menjanjikan pelestarian budaya dan menghormati kebutuhan interpersonal.

Tujuan dari pernikahan itu sendiri berbeda-beda tergantung individu yang akan menjalanakn. Tetapi beberapa ahli megemukakan pendapatnya mengenai tujuan utma dari pernikahan antara lain:

Soemijati (dalam Bachtiar, 2004) menjelaskan bahwa tujuan pernikahan adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan,terjalinnya hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan keluarga bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, memperoleh keturunan yang sah dengan mengikuti ketentuan yang telah diatur oleh hukum.

Tidak berbeda jauh, Masdar Helmy (dalam Bachtiar, 2004) mengemukakan bahwa tujuan pernikahan antara lain pemenuhan kebutuhan

jasmani dan rohani manusia serta membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunannya, mencegah perzinahan, agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat.

Menurut Bachtiar (2004), membagi lima tujuan pernikahan yang paling pokok adalah:

1. Memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur
2. Mengatur potensi kelamin
3. Menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang dilarang agama
4. Menimbulkan rasa cinta antara suami-isteri
5. Membersihkan keturunan yang hanya bisa diperoleh dengan jalan pernikahan.

Sedangkan, Undang-Undang juga menjabar tujuan pernikahan itu sendir. Dalam Undang-Undang Pernikahan tahun 1974 Pasal 1 dengan jelas menyebutkan, bahwa tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dari beberapa penjabaran ini semakin jelas bahwa pernikahan hadir sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan manusia, membentuk keluarga serta meneruskan keturunan. Hal ini menjadi patokan umumdari banyak individu sebgai tujuan utama untuk melakukan pernikahan.

Dalam prakteknya di masyarakat, pernikahan menjadi hal sakral dan penting bagi masyarakat Indonesiaaaa. Tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan rohani dan jasmani ataupun meneruskan keturunan, pernikahan menjadi salah satu sarana perbaikan status maupun ekonomi di masyarakat. Pernikahan juga menjadi penilaian dari kesuksesan dari seseorang dalam pencapaian hidup.

Budaya inilah yang menjadikan pernikahan adalah hal yang amata penting pada lingkungan kebudayaan masyarakat. Selain itu, dalam kependudukan pernikahan merupakan salah satu unsur penting dalam perkembangan kependudukan. Pernikahan menjadi faktor yang sangat mempengaruhi demografi. Hal ini karena pernikahan menyatukan dua orang menjadi satu keluarga dan meneruskan keturunan. Hal ini jelas menunjukkan pernikahan sangat mempengaruhi kependudukan.

Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat	e ISSN : 2581-1126 p ISSN : 2442-448X	Vol 7, No: 1	Hal: 100 - 115	April 2020
---	--	--------------	----------------	------------

Remaja

Remaja merupakan fase yang amat penting dalam kehidupan manusia. Merupakan fase peralihan dari masa remaja menuju kedewasaan, remaja menjadi masa yang paling menarik dalam kondisinya baik secara fisik maupun psikisnya. Karena merupakan fase peralihan, maka kondisi fisik dan psikis juga masuk dalam masa peralihan sehingga menunjukkan fenomena yang menarik.

Kata remaja (*adolescence*) berasal dari kata *adolescere* (Latin) yang artinya tumbuh ke arah kematangan (Muss, 1968 dalam Sarwono, 2011: h.11). Istilah kematangan tersebut yaitu meliputi kematangan fisik maupun kematangan sosial dan psikologis.

Banyak peneliti yang turut memberikan pendapatnya dalam mendefinisikan remaja:

1. Piaget mendefinisikan remaja sebagai umur dimana seorang individu dapat berinteraksi dengan masyarakat dewasa, umur dimana anak merasa tidak lagi dibawah ikatan orang yang lebih tua dan berada pada tingkatan yang sama minimalnya dalam masalah hak
2. Hurlock dan Elizabeth B mendefinisikan remaja sebagai masa peralihan dari anak – anak menuju dewasa yang mencakup kematangan mental, emosional, sosial dan fisik
3. Sarwono (2013) juga mengartikan remaja sebagai suatu masa dimana individu berkembang dari saat pertama kali ia menunjukkan tanda-tanda seksual sekundernya sampai saat ia mencapai kematangan seksual
4. Pratiwi (2012) mendefinisikan masa remaja sebagai masa perubahan yang didalamnya meliputi perubahan dalam sikap, dan perubahan fisik

Lebih lanjut lagi, Sigmund Freud menyebutkan masa remaja sebagai periode di mana libido atau energi seksual, yang tetap laten selama bertahun-tahun masa pra remaja, dihidupkan kembali. Dorongan seksual dicetuskan oleh androgen tertentu, seperti testosteron yang mempunyai kadar lebih tinggi selama masa remaja dibandingkan dengan masa manapun di dalam hidupnya.

Selanjutnya, karena masa remaja adalah masa yang ditandai oleh adanya perkembangan yang pesat dari aspek biologik, psikologik, dan juga sosialnya. Kondisi ini mengakibatkan terjadinya berbagai disharmonisasi yang membutuhkan penyeimbangan sehingga remaja dapat mencapai taraf perkembangan psikososial yang matang

sesuai dengan tingkat usianya. (Wahyuningrum, 2013).

WHO memberikan definisi konseptual tentang remaja, yang meliputi kriteria biologis, psikologis, dan sosial ekonomi. WHO menetapkan usia 10-20 tahun sebagai batas umur remaja. Tapi kemudian berdasarkan pada usia kesuburan (*fertilitas*) WHO kembali membagi remaja menjadi 2 fase utama yaitu remaja awal yang berusia 10-14 tahun dan remaja akhir dengan usia 15-20 tahun.

Menurut WHO (Sarwono, 2011), remaja merupakan suatu masa dimana:

1. Individu berkembang dari saat pertama kali ia menunjukkan tanda-tanda seksual sekundernya sampai saat ia mencapai kematangan seksual. (Kriteria biologis).
2. Individu mengalami perkembangan psikologis dan pola identifikasi dari kanak-kanak menjadi dewasa. (Kriteria sosial-psikologis).
3. Terjadi peralihan dari ketergantungan sosial-ekonomi yang penuh kepada keadaan yang relatif lebih mandiri. (Kriteria sosial-ekonomi).

Remaja memiliki taraf perkembangannya sendiri. Taraf-taraf perkembangan yang terjadi pada remaja terbagi menjadi tiga (Allsjaahbana Anna, 1983) diantaranya yaitu :

1. Periode Remaja Awal

Setelah perubahan alat-alat kelamin fisik menjadi nyata, maka kita melihat bahwa anak-anak mempunyai kesulitan dalam hal menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang mereka alami. Mereka lebih banyak menyendiri dan merasa terasing. Kontrol terhadap dirinya menjadi bertambah sulit dan mereka menjadi cepat marah serta meluapkan emosinya dengan cara-cara yang kurang wajar untuk meyakinkan lingkungan sekitarnya.

2. Periode Remaja Tengah

Dalam periode ini permasalahan yang dialami individu yaitu berkisar pada rasa tanggung jawab yang harus mereka pikul sendiri. Nilai-nilai sosial yang berlaku di masyarakat juga terbawa sebagai suatu masalah, karena mereka mulai meragukan tentang apa yang disebut baik atau buruk dan mulai ada keinginan untuk membentuk nilai mereka sendiri.

3. Remaja Akhir

Periode ini berlangsung pada individu mulai dari usia 18 sampai 21 tahun dan remaja mulai

Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat	e ISSN : 2581-1126 p ISSN : 2442-448X	Vol 7, No: 1	Hal: 100 - 115	April 2020
---	--	--------------	----------------	------------

memandang dirinya sebagai orang dewasa. Orangtua dan masyarakat pun turut berperan dengan mulai memberikan kepercayaan yang lebih pada individu yang memasuki periode ini. Hubungan sosial dan hubungan seksual mulai menjadi hubungan yang tetap, mereka sudah dapat menerima perubahan yang terjadi pada tubuhnya dan telah mempunyai identitas seksual yang kuat.

Pernikahan Dini

Secara hukum, Pemerintah Indonesia sendiri telah secara jelas mengatur mengenai pernikahan itu sendiri. Bukti nyata nya adalah keberadaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Pernikahan. Tidak hanya menerangkan mengenai pernikahan serta syaratnya, undang-undnag juga secara khusus menetapkan usia minimal dari pernikahan itu sendiri.

Menurut data yang dimiliki oleh Susenas per taun 2015, angka pernikahan dini di Indonesia mencapai persentase 23%. Dimana angka ini menunjukkan bahwa satu dari lima anak perempuan telah melakukan pernikahan dibawah usia delapan belas tahun. Menurut data ini pula, ada lima provinsi di Indonesia yang angka pernikahan dini nya melebihi nagk nasional yaitu Sulawesi Barat (34,22%), Kalimantan Selatan (33,68%) , Kalimantan Tengah (33,56%), Kalimantan Barat (32,21%) dan Sulawesi Tengah (31,91%).

Pada tahun 2019 lalu, pemerintah telah merevisi peraturan uasi minimal pernikahan. Pada sebelumnya, usia minimal pernikahan adalah 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki. Tetapi setelah revisi, usia minimal dirubah menjadi 19 tahun untuk perempuan dan laki-laki.

Secara perngertian, pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan atau salah satu pasangannya masih dikategorikan remaja yang masih berusia dibawah 19 tahun (WHO, 2006). Sedangkang BKKBN (2012) mengartikan pernikahan dini sebagai perjdohan atau pernikahan yang melibatkan satu atau kedua pihak, sebelum pihak wanita mampu secara fisik, fisiologi, dan psikologi untuk menanggung beban pernikahan dan memiliki anak, dengan batasan umur umum adalah di bawah 18 tahun.

Lebih lanjut, beberapa ahli juga turut memberikan pendapatnya mengenai pengertian dari pernikahan dini

1. Nurhasanah (2012) menyatakan bahwa pernikahan dini adalaha pernikahan yang dilakukan oleh

seseorang yang pada dasarnya memiliki kurang persiapan baik biologis, psikologis dan sosial-ekonomi. Atau juga merupakan ikatan antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri di usia muda atau remaja

2. Dlori (2005) menyatakan bahwa Pernikahan dini adalah pernikahan dibawah umur yang persiapannya sangat terburu-buru tidak maksimal baik secara fisik, persiapan mental, serta persiapan materi. Sehingga pernikahan ini dinilai sebagai pernikahan yang terburu-buru karena perisapannya yang tidak matang

Dari beberapa pengertian ini, dapat disimpulkan bahwa pernikahan dini merupakan pernikahan yang melibatkan remaja dibawah umur 18 tahun dan minim persiapan karena disiapkan terburu tanpa melihat kesiapan fisik, psikis dan materi yang bersangkutan.

Faktor penyebab terjadi fenomena ini sangatlah banyak. BKKBN menyebutkan beberapa factor yang mendorong terjadinya pernikahan dini karena norma yang berlaku di masyarakat dan mempengaruhi social-ekonomi diantara generasi.

Banyak anggapan mengenai pernikahan khususnya pada kaum perempuan. Anggapan "telat jodoh" , "perawan tua" dan sebagainya mendorong perempuan untuk segera dinikahkan di usia dini. Pernikahan ini biasanya terjadi melalui perjodohan dan pada usia perempuan pertama kali mendapat menstruasi. Hal ini dilakukan agar sang perempuan tidak mengalami kesulitan jodoh di masa mendatang.

Lebih lanjut Nurkasiani (2002) menjabarkan factor-faktor yang mendorong terjadi pernikahan dini antara lain:

1. Faktor individu

a. Perkembangan fisik, mental, dan sosial yang dialami seseorang makin cepat perkembangan tersebut dialami, makin cepat pula berlangsungnya perkawinan sehingga mendorong terjadinya perkawinan pada usia muda.

b. Tingkat pendidikan yang dimiliki oleh remaja. Makin rendah tingkat pendidikan, makin mendorong berlangsungnya perkawinan usia muda.

c. Sikap dan hubungan dengan orang tua. Perkawinan usia muda dapat berlangsung karena

Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat	e ISSN : 2581-1126 p ISSN : 2442-448X	Vol 7, No: 1	Hal: 100 - 115	April 2020
---	--	--------------	----------------	------------

adanya sikap patuh dan/atau menentang yang dilakukan remaja terhadap perintah orang tua.

d. Sebagai jalan keluar untuk lari dari berbagai kesulitan yang dihadapi, termasuk kesulitan ekonomi

2. Faktor keluarga. Peran orang tua dalam menentukan perkawinan anakanak mereka dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut.

a. Sosial ekonomi keluarga. Akibat beban ekonomi yang dialami, orang tua mempunyai keinginan untuk mengawinkan anak gadisnya. Perkawinan tersebut akan memperoleh dua keuntungan, yaitu tanggung jawab terhadap anak gadisnya menjadi tanggung jawab suami atau keluarga suami dan adanya tambahan tenaga kerja di keluarga yaitu menantu yang dengan sukarela membantu keluarga istrinya.

b. Tingkat pendidikan keluarga. Makin rendah tingkat pendidikan keluarga, makin sering ditemukan perkawinan di usia muda. Tingkat pendidikan berhubungan erat dengan pemahaman keluarga tentang kehidupan berkeluarga.

c. Kepercayaan dan/atau adat istiadat yang berlaku dalam keluarga. Kepercayaan dan adat istiadat yang berlaku dalam keluarga juga menentukan terjadinya perkawinan di usia muda.

d. Kemampuan yang dimiliki keluarga dalam menghadapi masalah remaja. Jika keluarga kurang memiliki pilihan dalam menghadapi masalah remaja, (mis, anak gadisnya melakukan perbuatan zina), anak gadis tersebut dinikahkan sebagai jalur keluarnya. Tindakan ini dilakukan untuk menghadapi rasa malu atau rasa bersalah.

3. Faktor masyarakat lingkungan

a. Adat istiadat. Terdapat anggapan di berbagai daerah bahwa anak gadis yang telah dewasa, tetapi belum berkeluarga, akan dipandang "aib" bagi keluarganya.

b. Pandangan dan kepercayaan. Pandangan dan kepercayaan yang selalu melekat pada masyarakat dapat pula mendorong terjadinya perkawinan di usia muda.. Interpretasi yang salah terhadap ajaran agama juga dapat menyebabkan terjadinya perkawinan usia muda.

c. Penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan

d. Tingkat pendidikan masyarakat. Perkawinan usia muda dipengaruhi pula oleh tingkat pendidikan masyarakat secara keseluruhan. Masyarakat yang tingkat pendidikannya amat

rendah cenderung mengawinkan anaknya dalam usia yang masih muda.

e. Tingkat ekonomi masyarakat. Masyarakat yang tingkat ekonominya kurang memuaskan sering memilih perkawinan sebagai jalan keluar dalam mengatasi kesulitan ekonomi.

f. Tingkat kesehatan penduduk. Jika suatu daerah memiliki tingkat kesehatan yang belum memuaskan dengan masih tingginya angka kematian, sering pula ditemukan perkawinan usia muda di daerah tersebut.. Perkawinan usia muda tersebut juga bertujuan untuk menjamin garis keturunan dari keluarga yang bersangkutan.

g. Perubahan nilai. Akibat pengaruh modernisasi, terjadi perubahan nilai, yaitu semakin bebasnya hubungan antara pria dan wanita .

h. Peraturan perundang-undangan. Peran peraturan perundang-undangan dalam perkawinan usia muda cukup besar. Jika peraturan perundangundangan masih membenarkan perkawinan usia, akan terus ditemukan perkawinan usia muda. Peraturan perundang-undangan perkawinan Indonesia nomor 1 tahun 1974 menyatakan bahwa usia minimal seorang wanita untuk menikah adalah 16 tahun.

Selanjutnya, Soebaki(2006) juga turut mengemukakan pendapatnya bahwa pernikahan dini memiliki resiko yang sangat besar karena banyak diantara mereka yang secara mental belum siap untuk mengemban resiko serta tanggung jawab dalam membangun keluarga. Ia juga menjabarkan beberapa penyebab yang mendorong terjadinya pernikahan dini

a. Pendidikan yang rendah

Pendidikann yang rendah adalah salah satu penyebab banyaknya terjadi pernikahan dini. Umumnya kurang menyadari bahaya yang timbul akibat pernikahan dini. Banyak remaja putus sekolah atau hanya tamat sekolah dasar, kemudian menikah karena tidak punya kegiatan.

b. Peraturan budaya

Peraturan budaya bisa jadi merupakan salah satu faktor pemicu terjadinya pernikahan dini. Usia layak menikah menurut aturan budaya seringkali dikaitkan dengan datangnya haid pertama bagi wanita. Dengan demikian, banyak remaja yang sebenarnya belum layak menikah, terpaksa menikah karena desakan budaya.

Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat	e ISSN : 2581-1126 p ISSN : 2442-448X	Vol 7, No: 1	Hal: 100 - 115	April 2020
---	--	--------------	----------------	------------

c. "Kecelakaan"

Tidak sedikit pernikahan dini di sebabkan "kecelakaan" yang tidak disengaja akibat pergaulan yang tidak terkontrol. Dampaknya mereka harus mempertanggungjawabkan perbuatan dengan menikah secara dini. Untuk menutupi aib keluarga, tidak ada jalan lain kecuali menikahkan mereka secara dini. Pernikahan model ini biasanya tidak akan bertahan lama karena landasannya tidak kuat.

d. Keluarga cerai (broken home)

e. Banyak anak-anak korban perceraian terpaksa nikah secara dini karena berbagai alasan, misalnya tekanan ekonomi, untuk meringankan beban orang tua tunggal, membantu keluarga, mendapatkan pekerjaan, meningkatkan taraf hidup, dan sebagainya.

f. Daya tarik fisik Faktor lain yang sering mendorong terjadinya pernikahan dini adalah daya tarik fisik. Banyak remaja yang terjerumus ke dalam pernikahan karena daya tarik fisik. Karena daya tarik fisik sangat terbatas, pernikahan biasanya tidak berusia Panjang

Faktor- faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan dalam usia muda yakni menurut RT. Akhmad Jayadiningrat, sebab-sebab utama dari pernikahan usia muda adalah:

a. Keinginan untuk segera mendapatkan tambahan anggota keluarga

b. Tidak adanya pengertian mengenai akibat buruk pernikahan terlalu muda, baik bagi mempelai itu sendiri maupun keturunannya.

c. Sifat kolot orang Jawa yang tidak mau menyimpang dari ketentuan adat. Kebanyakan orang desa mengatakan bahwa mereka itu mengawinkan anaknya begitu muda hanya karena mengikuti adat kebiasaan saja.

Selain menurut para ahli di atas, ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya pernikahan usia muda yang sering dijumpai di lingkungan masyarakat kita yaitu faktor ekonomi, pendidikan, keluarga, kemauan sendiri, media masa dan hamil diluar nikah

a. Faktor Ekonomi

Rendahnya tingkat ekonomi keluarga mendorong si anak untuk menikah diusia yang tergolong muda untuk meringankan beban orang tuanya. Dengan si anak menikah sehingga bukan lagi menjadi tanggungan orang tuanya (terutama untuk anak perempuan), belum lagi suami anaknya akan

bekerja atau membantu perekonomian keluarga maka anak wanitanya dinikahkan dengan orang yang dianggap mampu.

b. Faktor Pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan cenderung melakukan aktivitas sosial ekonomi yang turun temurun tanpa kreasi dan inovasi. Akibat lanjutnya produktivitas kerjanya sangat rendah sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara memadai. Karena terkadang seorang anak perempuan memutuskan untuk menikah diusia yang tergolong muda. Pendidikan dapat mempengaruhi seorang wanita untuk menunda usia untuk menikah. Makin lama seorang wanita mengikuti pendidikan sekolah, maka secara teoritis makin tinggi pula usia kawin pertamanya. Seorang wanita yang tamat sekolah lanjutan tingkat pertamanya berarti sekurang-kurangnya ia menikah pada usia di atas 16 tahun ke atas, bila menikah diusia lanjutan tingkat atas berarti sekurang-kurangnya berusia 19 tahun dan selanjutnya bila menikah setelah mengikuti pendidikan di perguruan tinggi berarti sekurang-kurangnya berusia di atas 22 tahun.

c. Faktor Keluarga/ Orang tua Biasanya orang tua bahkan keluarga menyuruh anaknya untuk menikah secepatnya padahal umur mereka belum matang untuk melaksanakan pernikahan, karena orang tua dan keluarga khawatir anaknya melakukan hal-hal yang tidak di inginkan ketika anak perempuannya berpacaran dengan laki-laki. Hal ini merupakan hal yang sudah biasa atau turun-temurun dan menimbulkan pemikiran bagi keluarga yang mempunyai anak gadis tidak akan merasa tenang sebelum anak gadisnya menikah.

d. Faktor kemauan sendiri Hal ini disebabkan karena keduanya merasa sudah saling mencintai dan adanya pengetahuan anak yang diperoleh dari film atau media-media yang lain, sehingga bagi mereka yang telah mempunyai pasangan atau kekasih terpengaruh untuk melakukan pernikahan di usia muda.

e. Faktor Media massa Media cetak maupun elektronik merupakan media massa yang paling banyak digunakan oleh masyarakat kota maupun desa. Oleh karena itu, media masa sering digunakan sebagai alat menstransformasikan informasi dari dua arah, yaitu dari media massa ke arah masyarakat atau menstransformasi diantara masyarakat itu sendiri.

Dari beberapa pendapat diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pernikahan dini banyak terjadi

Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat	e ISSN : 2581-1126 p ISSN : 2442-448X	Vol 7, No: 1	Hal: 100 - 115	April 2020
---	--	--------------	----------------	------------

karena bermacam-macam. Faktor paling utama yang mempengaruhi ekonomi kemudian budaya, tingkat Pendidikan, hingga “kecelakaan” menjadi factor yang mendorong terjadinya pernikahan dini.

Dampak Pernikahan dini

Karena dilakukan oleh remaja yang masih belum stabil secara fisik, psikis maupun materi, pernikahan dini amat rentan dengan berbagai permasalahan. Permasalahan ini muncul dan dapat emnyebabkan masalah lain yang lebih luas dampaknya

Dilansir dari laman Kompas.com , dijabarkan mengenai dampak dari terjadinya pernikahan dini. Berdasarkan analisa data perkawinan usia anak di Indonesia hasil kerja sama BPS dan United Nations Children's Fund (UNICEF) berbagai dampak negatif yang dapat terjadi pada sebuah pernikahan yang dilakukan pada usia anak.

1. Dampak bagi anak perempuan

Anak perempuan menjadi orang yang paling dirugikan dalam pernikahan dini. Pertama, hak nya sebagai seorang anak terampas. Hak pendidikan, hak untuk hidup bebas dari kekerasan dan pelecehan, hak kesehatan, hak dilindungi dari eksploitasi, dan hak tidak dipisahkan dari orangtua. Hak-hak tersebut jelas akan sangat merugikan seorang anak perempuan yang masih dalam pertumbuhan sebagai insane yang merdeka.

Seorang anak yang menikah di usia dini mempunyai risiko kehamilan yang sangat besar. Risiko ini didapat karena kondisi fisik yang belum siap untuk mengandung sehingga sangat membahayakan. Risiko ini bisa mencapai lima kali lipat dari orang yang menikah pada umur yang matang atau dewasa. Selanjutnya, seorang anak perempuan yang menikah akan mengalami sejumlah persoalan psikologis seperti cemas, depresi, bahkan keinginan untuk bunuh diri. Di usia yang masih muda, anak-anak ini belum memiliki status dan kekuasaan di dalam masyarakat. Mereka masih terkungkung untuk mengontrol diri sendiri. Terakhir, pengetahuan seksualitas yang masih rendah meningkatkan risiko terkena penyakit infeksi menular seperti HIV.

2. Dampak bagi anak-anak hasil pernikahan dini

Risiko kesehatan tidak hanya berada pada pihak ibu tapi juga anak-anak yang nantinya lahir dari hubungan kedua orangtuanya yang menikah di bawah umur. Belum matangnya usia sang ibu, memberikan konsekuensi tertentu pada si calon anak. Misal, angka risiko kematian bayi lebih besar,

bayi lahir dalam keadaan prematur, kurang gizi, dan anak berisiko terkena hambatan pertumbuhan atau stunting.

3. Dampak di masyarakat

Pernikahan dini juga juga dapat berdampak pada masyarakat luas, salah satunya garis kemiskinan yang berkelanjutan. Hal tersebut terjadi akibat pernikahan dini biasanya tidak dibarengi dengan tingginya tingkat pendidikan dan kemampuan finansial. Hal itu jelas akan berpengaruh besar terhadap cara didik orangtua yang belum matang secara usia kepada anak-anaknya. Pada akhirnya, berbuntut siklus kemiskinan yang berkelanjutan.

Indonesia masih mencatatkan kasus anak-anak yang menjadi korban hanya karena masalah yang dihadapi orang tua. Akibat perkawinan anak juga, Indonesia masih mencatatkan tingginya angka kekerdilan (stunting), anak putus sekolah, kekerasan dalam rumah tangga dan kemiskinan.

Masalah ini jelas sangat berbahaya jika dibiarkan melebar karena akan sangat berdampak pada kehidupan bermasyarakat dan pembungan daerah. Hal ini dikarenakan, maslaah ini berubah menjadi masalha social yang membutuhkan perhatian pemerintah dan pihak terkait yang lebi luas. Selain itu, dapat mengganggu kestabilan di masyarakat karena dampak-dampak ini dapat membuat masyarakat malah menjadi memandang skeptis pernikahan dan semakin tinggi nya angka maslaah social di suatu daerah.

Pembangunan Daerah

Pembangunan suatu daerah agra berjalan baik tidak hanya terjadi dalam bidang ekonomi. Agar terjadi pembangunan baik dan berkelanjutan, maka bidang social juga berperan penting dalam usaha daerah membangun dan membawa kesejahteraan bagi setiap penduduknya.

Undang-Undang (UU) Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pernbangunan Keluarga menyebutkan pentingnya pembangunan manusia Indonesia yang seutuhnya, meliputi semua dimensi dan aspek kehidupan, termasuk perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga. Upaya tersebut ditujukan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merupakan prinsip dasar pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pembangunan dilakukan oleh penduduk serta untuk penduduk. Oleh sebab itu, perencanaan

Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat	e ISSN : 2581-1126 p ISSN : 2442-448X	Vol 7, No: 1	Hal: 100 - 115	April 2020
---	--	--------------	----------------	------------

pembangunan wajib didasarkan pada keadaan atau kondisi penduduk serta pembangunan wajib dapat dinikmati oleh semua penduduk bukan cuma oleh sebagian ataupun golongan tertentu. Oleh karena itu, perlu perhatian secara khusus untuk memastikan pembangunan seluruhnya oleh rakyat.

Pembangunan daerah tidak hanya berfokus pada sector ekonomi. Ada pula pembangunan social yang focus utamanya adalah adalah sector social. Pembangunan social merupakan proses untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan sejalan dengan proses pembangunan social

Beberapa ahli mengartikan Pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Nugroho dan Rochmin Dahuri (2004) meknai pembanguna sebagai , sebagai suatu usaha yang terkoordinasi untuk menciptakan alternatif yang lebih banyak secara sah kepada setiap warga negara untuk memenuhi dan mencapai aspirasinya yang paling manusiawi.

2. Easton (1985) mengartikan pembanguna sebagai usaha untuk meningkatkan taraf hidup serta merealisasikan potensi yang ada secara sistematis. Proses sistematis ini paling tidak terdiri dari 3 unsur. Pertama, adanya input, yaitu bahan masukan konservasi. Kedua, adanya proses konservasi, yaitu wahana untuk mengolah bahan masukan. Ketiga, adanya output, yaitu sebagai hasil dari proses konservasi yang dilaksanakan.

3. Siagian (1994) mengemukakan pembanguna sebagai Suatu upaya atau rangkaian usaha untuk pertumbuhan dan perubahan yang terencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah dan menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (nation building)

4. Bintoro Tjokroamidjojo mengartikan Pembangunan merupakan suatu proses perubahan sosial yang terencana meliputi berbagai dimensi untuk mengusahakan kemajuan dalam kesejahteraan ekonomi, modernisasi, pembangunan bangsa, wawasan lingkungan dan bahkan peningkatan kualitas manusia untuk memperbaiki kualitas hidupnya.

Dari beberapa pengertian tersebut, dapat dimaknai bahwa pembangunan suatu proses perencanaan (social plan) yang dilakukan oleh pemerintah sebagai perencanaan pembangunan dengan tujuan membuat perubahan sebagai proses untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Faktor-faktor pendorong

Pembangunan sebagai sebuah proses untuk memperbaiki kehidupan masyarakat dalam suatu daerah atau negara. Ketika pembanguna berjalan secara berlanjut dan merata maka kesejahteraan masyarakat akan tercapai. Untuk mewujudkan pembanguna daerah yang berkelanjutan, maka ada factor-faktor yang membantu pembanguna berjalan dengan lancar. Faktor-faktor ini harus dipenuhi sebagai barometer dalam mencapai pembangunan yang berkelanjutan tersebut. Faktor-faktor yang mendorong antara lain:

1. Tersedianya sumber daya alam yang melimpah, dan sumberdaya manusia yang sudah mumpuni di bidang pembangunan. Keduanya merupakan factor penting dalam mendorong pembanguna akan berjalan dan dimaksimalkan untuk kemajuan daerah.
2. Adanya kepastian hukum atau peraturan yang mengatur kebijakan pembangan berkelanjutan
3. Tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi serta adanya kesadaran masyarakat akan pentingnya pembangunan

Hambatan Pembangunan Daerah

Ketika membicarakan mengenai factor pendorong, maka tentu terdapat hambatan dalam mewujudkan sebuah pembangunan yang berkelanjutan di sebuah daerah. Hambatan-hambatan ini menjadi batu sandungan dalam mencapai kesejahteraan yang diimpikan.

Di Indonesia sendiri sebagai negara kepulauan yang luas, amat sulit untuk menyamaratakan pembangunan dari Sabang sama Merauke. Selain karena jarak, keterbatasan akses serta ketidak merataan penduduk jelas mempengaruhi dalam proses untuk mecapai pembangunan yang berkelanjutan. Daerah pun juga turut merasakan hal yang sama.

Beberapa hambatan yang menyulitkan tercapainya pembanguna daerah yang berkelanjutan antara lain:

1. Kondisi alam yang berbeda-beda pada setiap daerah mengakibatkan pendekatan yang dilakukan untuk mencapai pembangunan sulit dicapai.
2. Kurangnya partisipasi masyarakat, hal di karenakan kurangnya wawasan dan pola pikir tentang pentingnya pembangunan berkelanjutan.
3. Kurang memaksimalkan sumber daya yang tersedia untuk mencapai pembanguna yang berkelanjutan

Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat	e ISSN : 2581-1126 p ISSN : 2442-448X	Vol 7, No: 1	Hal: 100 - 115	April 2020
---	--	--------------	----------------	------------

4. Tidak adanya kerja sama yang harmonis antara pemerintah daerah dengan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan

Ketika suatu daerah tidak dapat menghadapi hambatan-hambatan tersebut, sulit untuk mencapai pembanguna daerah yang tepat. Pembangunan daerah akan dicapai ketika semua elemn masyarakat saling bahu membahu demi terciptanya masyarakat yang sejahtera dan indeks pembangunannya terus membaik.

METODE PENELITIAN

Jurnal ini disusun menggunakan kajian literatur berupa jurnal, makalah, buku, artikel, berita online serta jenis tulisan dan dokumen lainnya yang mendukung mengenai studi kependuduka, pernikahan dini dan pembangunan daerah.

PEMBAHASAN

Seperti pada sebelumnya, pernikahan dini terjadi karena berbagai sebab. Faktor-faktor inilah yang membuat pernikahan dini banyak terjadi, khususnya di tempat-tempat dengan angka kemiskinan tinggi atau lingkungan yang masih terikat dengan budaya.

Pemerintah Indonesia pada tahun 2019 telah merubah batas usia minimal untuk pernikahan pada Undang-Undang Nomr 1 Tahun 1974 dari yang semula minimal 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki mnejadi minimal 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan. Membuktikan usaha pemrintah dalam menangani permasalahan kependudukan ini.

Menurut penelitian yang dilakukan UNICEF Bersama dengan BPS memang semakin tahun ke tahun angka pernikahan dini menurun di Indonesi namun tetap masuk dalam 10 besar negara dengan angka pernikahan dini tertinggi di Indonesia.

Menurut data pada tahun 2018, angka pernikahan dini di Indonesia adalah 11,2% atau sekitar 1.220.900 remaja di bawah 18 tahun telah menikah. Artinya, 1 dari 9 remaja perempuan di Indonesia telah menikah dan dari data tersebut, 3 provinsi di Indonesia yang memiliki angka prevelensi tertinggi adalah Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat dan Sulawesi Tenggara.

Angka ini masih cukup memperhatikan apalagi jika dilihat bahwa kebanyakan yang menjadi korban ppernikahan dini adalah anak-anak perempuan dimana tercatat lebih dari satu juta anak

perempuan dibawah 18 tahun dan 61 ribu anak perempuan dibawah 15 tahun yang telah menikah.

Sedangkan, untuk laki-laki sendiri persentasenya sangat kecil yaitu hanya 1,06% anak laki-laki yang telah menikah dibawah umur 18 tahun atau hanya 1 dari 100 orang. Angka ini justru menunjuuka peningkatan dibandingkan data pada tahun 2015 yang hanya sebesar 0,73%.

Perkawinan anak berhubungan dengan berbagai faktor yang dapat bersifat struktural maupun yang berasal dari komunitas, keluarga, maupun kapasitas individual. Temuan dari Susenas dan studi literatur memperlihatkan bahwa anak yang lebih rentan terhadap perkawinan anak adalah anak perempuan, anak yang tinggal di keluarga miskin, di perdesaan, dan memiliki Pendidikan rendah.

Lainya, pernikahan anak masih terus terjadi di beberapa daerah dengan dinamika dan faktor penyebabnya yang beragam, diantaranya tingkat pendidikan, ekonomi, nilai dan moral, sosial budaya, pemahaman agama yang keliru, dan sering situasi bencana dan konflik berpengaruh tinggi juga terhadap perkawinan anak.

Pekerja perempuan usia 18 tahun ke bawah lebih mungkin untuk bekerja di sector informal dan karenanya menjadi lebih rentan apabila dibandingkan dengan perempuan dalam kelompok umur yang sama yang menikah setelah 18 tahun dan bekerja. Laporan ini memperlihatkan kemiskinan bukan satu-satunya faktor pendorong terjadinya perkawinan anak. Apabila dihubungkan dengan persentase penduduk miskin, perkawinan anak terjadi di provinsi-provinsi dengan penduduk miskin yang tinggi maupun cukup rendah.

Dilansir dari lingkaran.net ada beberapa alasan mengan mereka yang berumur di bawah 21 tahun sebetulnya masih belum siap untuk menikah. Ketidaksiapan anak menikah dapat dilihat dari 5 aspek tumbuh kembang anak yaitu:

1. Fisik

Fisik seorang anak pada usia remaja masih dalam proses berkembang. Kalau berhubungan seksual akan rentan terhadap berbagai penyakit, khususnya untuk perempuan.

2. Kognitif

Di usia anak dan remaja, wawasan belum terlalu luas, kemampuan problem solving dan decision making juga belum berkembang matang. Apabila

Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat	e ISSN : 2581-1126 p ISSN : 2442-448X	Vol 7, No: 1	Hal: 100 - 115	April 2020
---	--	--------------	----------------	------------

ada masalah dalam pernikahan, mereka cenderung kesulitan menyelesaikannya.

3. *Bahasa*

Anak dan remaja tidak selalu bisa mengomunikasikan pikirannya dengan jelas. Hal ini dapat menjadi masalah besar dalam pernikahan.

4. *Sosial*

Jika menikah di usia remaja, kehidupan sosial anak akan cenderung terbatas dan kurang mendapatkan support dalam lingkungannya.

5. *Emosional*

Emosi remaja biasanya labil. Kalau mendapatkan masalah akan lebih mudah untuk depresi dan hal ini berisiko terhadap dirinya sebagai remaja, dan anak yang dilahirkan dalam pernikahan. Selain itu, dengan emosi yang labil, anak / remaja yang menikah lebih sering bertengkar, sehingga pernikahannya tidak bahagia.

Hal ini jelas menunjukkan secara jelas bahwa pernikahan dini lebih banyak merugikan kaum perempuan. Karena itulah, korban dari pernikahan dini juga kebanyakan dari kaum perempuan.

Pernikahan dini menjadi salah satu masalah kependudukan yang kompleks. Permasalahan ini berasal dari berbagai aspek yang lekat pada masyarakat. Pernikahan dini juga dapat menjadi barometer pembangunan daerah karena pernikahan dini merupakan cerminan dari tingkat kesejahteraan dari daerah tersebut.

Angka pernikahan dini dapat menunjukkan angka pembanguna serta kualitas penduduk yang ada pada suatu daerah. Selain itu kesejahteraan penduduk juga dapat tergambarkan melalui angka ini. Karena pernikahan dini merupakan masalah kependudukan yang kompleks dan terdiri atas berbagai macam faktor pendukung. Melalui pernikahan dini, kita dapat melihat kualitas Pendidikan, tingkat ekonomi serta keadaan dari social budaya yang ada pada suatu daerah sehingga mendorong hal itu terjadi.

Pernikahan dini yang tidak berjalan baik dapat memunculkan berbagai masalah. Selain itu, angka kelahiran yang muncul dari pernikahan dini juga sangat mempengaruhi situasi kependudukan itu sendiri. Hal ini jika tidak dikendalikan dapat membawa Indonesia pada bonus demografi.

Dilansir dari BKKBN, angka kelahiran di Indonesia sendiri cukup besar disumbangkan oleh pernikahan dini. Dari 1000 kelahiran , 36 kelahiran atau sekitar

30% diantaranya merupakan kelahiran dari pernikahan dini. Angka ini cukup mengkhawatirkan bagi populasi di Indonesia.

Tidak hanya itu, perempuan sebagai kaum yang cukup dirugikan dari pernikahan dini juga menimbulkan dampak sendir. Untuk para perempuan yang hamil di usia remaja, fisik yang belum siap justru akan mengakibatkan kehamilan membahayakan ibu dan bayi yang dikandung. Karena hal tersebut dapat menimbulkan komplikasi yang sangat membahayakan yang diakibatkan oleh fisik yang belum matang untuk mengandung.

Pernikahan dini juga mengakibatkan perempuan-perempuan yang masih masuk usia sekolah harus menghentikan pendidikannya. Hal ini tentu sangat merugikan karena mengurangi kesempatan mereka dalam menuntut ilmu dan memperbaiki masa depan.

Dari sisi ekonomi, banyak motif dilakukannya pernikahan di usia dini adalah perbaikan nasib tapi tidak semua berhasil. Karena hidup dalam keadaan miskin, gizi anak dan ibu tidak tercukupi apalagi dengan kondisi fisik yang rentan maka angka kematian ibu dan bayi diakibatkan gizi buruk juga menjadi meningkat. Selain itu angka anak-anak yang hidup dibawah kemiskinan juga menjadi tinggi karena hidup di keluarga miskin.

Selain itu, pernikahan dini dapat menyebabkan semakin tingginya angka *stunting* pada bayi. Dilansir dari website radioidola.com, stunting merupakan kegagalan tumbuh akibat gizi buruk kronis karena ibu belum bisa mengasuh dengan baik pada 1.000 hari pertama kehidupan.

Hal ini mengakibatkan pernikahan dini sangatlah berpengaruh pada kependudukan. Negara harus menyiapkan diri menghadapi bonus demografi yang akan terjadi di masa depan jika pernikahan dini tidak dikendalikan. Padahal, untuk menghadapi persaingan yang lebih luas, perlu menyiapkan baik individu hingga fasilitasnya sehingga manusia Indonesia dapat bersaing

Lebih lanjut, pernikahan dini kini menjadi barometer dari kemajuan pembangunan suatu daerah. Ketika angka pernikahan dini di suatu daerah kecil, maka dapat diyakini bahwa pembangunan daerah berlangsung secara lancar dan menyeluruh.

Pembangunan daerah merupakan pendorong dari tercapainya pembangunan social yang lebih baik. Jika kita menggunakan indicator yang digunakn dalam Sustainable Development Gross (SDGs) maka dapat bias dibandingkan jika factor-faktor

Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat	e ISSN : 2581-1126 p ISSN : 2442-448X	Vol 7, No: 1	Hal: 100 - 115	April 2020
---	--	--------------	----------------	------------

pendorong pada pernikahan dini merupakan halangan untuk tercapainya pembangunan yang berkelanjutan.

Ketika membicarakan pembangunan berkelanjutan, daerah tidak hanya perlu memikirkan dari segi ekonomi, tapi sisi social merupakan hal yang paling utama untuk menjadi bahan pertimbangan dalam mencapai pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Perkawinan anak juga menjadi salah satu indikator prioritas nasional ketiga dalam upaya meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing melalui program prioritas peningkatan kualitas anak perempuan dan pemuda dengan menargetkan penurunan angka perkawinan anak dari 11,2 persen pada 2018 menjadi 8,74 persen pada 2024.

Dalam tujuan SDGs, terdapat beberapa tujuan yang berkaitan dengan pernikahan dini yaitu kemiskinan, kelaparan, kesetaraan gender dan kesehatan. 4 tujuan ini merupakan hal-hal yang harus dicapai menuju pembangunan yang berkelanjutan sayangnya, pernikahan dini membuktikan bahwa tujuan ini masih jauh untuk dicapai.

Contoh yang paling jelas adalah provinsi yang memiliki angka pernikahan dini yang paling tinggi di Indonesia adalah Sulawesi Barat. Provinsi Sulawesi Barat memiliki persentase pernikahan dini sebesar 19,4% angka ini melebihi persentase nasional yang sebesar 11,2%.

Ketika diakses melalui website BPS untuk mengetahui angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dimiliki oleh Sulawesi Barat mencapai angka 65.1. Angka ini menjadi paling kecil dibanding seluruh provinsi yang berada di Pulau Sulawesi. Hal ini cukup menunjukkan bahwa angka pernikahan dini memang bisa menjadi barometer dalam menunjukkan pembangunan daerah.

Dilansir dari web National Geographic, ada 3 hal utama yang perlu diperhatikan untuk mengurangi angka pernikahan dini yang terjadi di Indonesia, 4 hal tersebut antara lain:

1. Menyediakan Pendidikan formal

Ketika usia minimal pernikahan dianikkan, maka kesempatan seorang anak untuk menuntut ilmu semakin besar. Hal ini berhubungan dengan hasil riset yang menyatakan Pendidikan dapat mencegah meningkatnya angka pernikahan dini. Hal ini dibuktikan dengan hasil survey lembaga Survey Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) pada tahun

2012 dimana anak-anak yang bersekolah hingga SMA lebih sedikit yang memutuskan untuk menikah ketimbang anak-anak yang hanya lulusan SMP. Lebih lanjut, ketika Pendidikan seorang anak khususnya perempuan lebih tinggi, maka kesempatannya untuk bekerja dan meningkatkan taraf ekonomi juga terbuka lebar. Hal ini tentu dapat membantu negara dalam bidang ekonomi dan penghidupannya juga menjadi lebih baik. Sehingga penting bagi pemerintah untuk menekankan Pendidikan minimal 12 tahun sebagai langkah untuk mencegah angka pernikahan dini semakin tinggi.

2. Pendidikan Seks

Institusi Credos pada tahun 2017 melakukan penelitian di Rembang Jawa Tengah menunjukkan bahwa kurangnya Pendidikan seks merupakan hal yang mendorong terjadinya pernikahan dini. Penelitian lainnya dilakukan oleh Aliansi Remaja Indonesia pada tahun 2016, memberikan data bahwa 7 dari 8 anak di Jakarta, Yogyakarta dan Jawa Timur bahwa mereka hamil sebelum melakukan pernikahan. Hal ini cukup mengkhawatirkan karena kehamilan di usia muda sangatlah rentan dan membahayakan bagi ibu dan bayi. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah memasukkan Pendidikan seks secara komprehensif ke dalam kurikulum.

3. Mendorong kesetaraan gender

Dari banyak penelitian khususnya dari UNICEF dan BPS anak perempuan sering kali menjadi korban atas pernikahan dini. Di lingkungan masyarakat sendiri, persepsi dan ekspektasi atas anak perempuan masih tinggi. Dari penelitian yang dilakukan Institut Credos tahun 2017, anak perempuan dianggap siap menikah ketika mereka sudah dapat mengurus keluarga. Sementara untuk anak laki-laki, waktu ketika mereka siap menikah ditentukan oleh diri mereka sendiri. Kebanyakan berpikir mereka siap ketika mereka merasa mandiri secara ekonomi. Ekspektasi inilah yang membuat angka pernikahan anak meningkat. Apalagi paham ini lebih besar tumbuh di daerah pedesaan sehingga angka pernikahan dini pun lebih tinggi di daerah pedesaan dibandingkan daerah perkotaan.

4. Mengatasi tabu

Indonesia merupakan negara dengan penerapan agama yang sangat kuat pada setiap sendi kehidupan. Nilai-nilai agama dijadikan pedoman hidup oleh hampir seluruh warga negara. Salah satu nilai agama yang mengakar kuat adalah

Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat	e ISSN : 2581-1126 p ISSN : 2442-448X	Vol 7, No: 1	Hal: 100 - 115	April 2020
---	--	--------------	----------------	------------

ketakutan masyarakat terhadap perzinahan semakin kuat seiring dengan meningkatnya konservatisme.

Gerakan tanpa pacarana menjadi salah satu patron yang membuat muncul pemahaman menikahakan anak atau melakukan pernikahan dini merupakan jalan terbaik untuk menjauhi zina. Hasil penelitian pada tahun 2019 yang dilakukan di Tuban, Jawa Timur; Mamuju, Sulawesi Barat dan Bogor, Jawa Barat menemukan bahwa alasan kebanyakan orang tua menikahakan anaknya di usia dini adalah karena takut anaknya melakukan perzinahan ketika mulai memiliki pacar.

Kita tidak bias menyalahkan pemahaman ini karena memang nilai agama yang terkandung didalamnya. Tapi, pernikahan dini sebagai penyelesaian tentu tidak dapat dibenarkan. Pernikahan tidak hanya membutuhkan kesiapan secara fisik luar tapi juga kondisi mental, kesehatan fisik serta materi menjadi mhal-hal yang perlu diperhatikan dalam memutuskan pernikahan.

Pendidikan menjadi faktor utama yang membantu penyelesaian masalah atas tingginya angka pernikahan dini di masyarakat. Edukasi mengenai pernikahan yang sebaiknya dilakukan oleh pada usia yang tepat harus dilakukan secara menyeluruh oleh setiap elemen masyarakat.

Pembangunan daerah sangatlah bergantung pada kemampuan daerah melakukan pemerataan diseluruh wilayahnya. Pemerataan ini antara lain adalah pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan infrastruktur. Ketika semua terpenuhi, maka bukan tidak mungkin angka pernikahan dini akan berkurang dan pembangunan daerah berjalan menuju kearah yang positif.

Ketika melakukan pembangunan berkelanjutan, maka salah satu factor utamanya adalah ekonomi. Ekonomi menjadi barometer utama dalam pembangunan suatu daerah dan ekonomi yang berkembang dengan baik. Dengan memberikan rakyat untuk melakukan kegiatan ekonomi, mempermudah akses jalan melalui infrastruktur maka itu semua akan menaikkan taraf ekonomi suatu daerah.

Kerja sama antara pemerintah dan setiap elemen masyarakat perlu dilakukan untuk menangani pernikahan dini. Karena, pernikahan dini dapat menjadi penunjuk bagaimana berjalannya pembanguna suatu daerah. Saat setiap masyarakat baik di desa maupun di kota Bersama dengan pemerintah daerah bekerja sama menaikkan pembangunan daerah maka masalah social dan kependudukan yang muncul akan

berkurang dan pemerataan pembangunan akan meluas sehingga kesejahteraan masyarakat daerah akan tercapai.

KESIMPULAN

Masalah kependudukan di Indonesia sangatlah beragam. Mulai dari pengangguran, angka persebaran penduduk yang tidak merata, angka kelahiran muda, angka penderita hiv dan AIDS hingga pernikahan dini. Masalah ini masuk dalam bahasan demografi karena berhubungan dengan kependudukan.

pernikahan merupakan hubungan yang terdapat didalamnya koneksi internal dan eksternal antara laki-laki dan wanita sebagai suami dan istri yang memiliki kekuatan hukum dan diakui sosial dalam rangka untuk membentuk sebuah keluarga sebagai satu set menjanjikan pelestarian budaya dan menghormati kebutuhan interpersonal.

Tujuan dari pernikahan itu sendiri berbeda-beda tergantung individu yang akan menjalanakn. Tetapi beberapa ahli megemukakan pendapatnya mengenai tujuan utama dari pernikahan:

Menurut Bachtiar (2004), membagi lima tujuan pernikahan yang paling pokok adalah:

1. Memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur
2. Mengatur potensi kelamin
3. Menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang dilarang agama
4. Menimbulkan rasa cinta antara suami-isteri
5. Membersihkan keturunan yang hanya bisa diperoleh dengan jalan pernikahan

WHO memberikan definisi konseptual tentang remaja, yang meliputi kriteria biologis, psikologis, dan sosial ekonomi. WHO menetapkan usia 10-20 tahun sebagai batas umur remaja. Tapi kemudian berdasarkan pada usia kesuburan (*fertilitas*) WHO kembali membagi remaja menjadi 2 fase utama yaitu remaja awal yang berusia 10-14 tahun dan remaja akhir dengan usia 15-20 tahun.

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan atau salah satu pasangannya masih dikategorikan remaja yang masih berusia dibawah 19 tahun (WHO, 2006). Sedangkang BKKBN (2012) mengartikan pernikahan dini sebagai perjudohan atau pernikahan yang melibatkan satu atau kedua pihak, sebelum pihak wanita mampu secara fisik, fisiologi, dan psikologi untuk menanggung beban

Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat	e ISSN : 2581-1126 p ISSN : 2442-448X	Vol 7, No: 1	Hal: 100 - 115	April 2020
---	--	--------------	----------------	------------

pernikahan dan memiliki anak, dengan batasan umur umum adalah di bawah 18 tahun.

Faktor penyebab terjadi fenomena ini sangatlah banyak. BKKBN menyebutkan beberapa factor yang mendorong terjadinya pernikahan dini karena norma yang berlaku di masyarakat dan mempengaruhi social-ekonomi diantara generasi.

Soebaki(2006) menjabarkan beberapa penyebab yang mendorong terjadinya pernikahan dini

a. Pendidikan yang rendah

Pendidikann yang rendah adalah salah satu penyebab banyaknya terjadi pernikahan dini. Umumnya kurang menyadari bahaya yang timbul akibat pernikahan dini.

b. Peraturan budaya

Peraturan budaya bisa jadi merupakan salah satu faktor pemicu terjadinya pernikahan dini. Usia layak menikah menurut aturan budaya seringkali dikaitkan dengan datangnya haid pertama bagi wanita. Dengan demikian, banyak remaja yang sebenarnya belum layak menikah, terpaksa menikah karena desakan budaya.

c. "Kecelakaan"

Tidak sedikit pernikahan dini di sebabkan "kecelakaan" yang tidak disengaja akibat pergaulan yang tidak terkontrol. Dampaknya mereka harus mempertanggungjawabkan perbuatan dengan menikah secara dini. Untuk menutupi aib keluarga, tidak ada jalan lain kecuali menikahkan mereka secara dini. Pernikahan model ini biasanya tidak akan bertahan lama karena landasannya tidak kuat.

d. Keluarga cerai (broken home)

Banyak anak-anak korban perceraian terpaksa nikah secara dini karena berbagai alasan, misalnya tekanan ekonomi, untuk meringankan beban orang tua tunggal, membantu keluarga, mendapatkan pekerjaan, meningkatkan taraf hidup, dan sebagainya.

e. Daya tarik fisik Faktor lain yang sering mendorong terjadinya pernikahan dini adalah daya tarik fisik. Banyak remaja yang terjerumus ke dalam pernikahan karena daya tarik fisik. Karena daya tarik fisik sangat terbatas, pernikahan biasanya tidak berusia Panjang

dampak dari terjadinya pernikahan dini. Berdasarkan analisa data perkawinan usia anak di Indonesia hasil kerja sama BPS dan United Nations Children's Fund (UNICEF) berbagai dampak negatif

yang dapat terjadi pada sebuah pernikahan yang dilakukan pada usia anak.

1. Dampak bagi anak perempuan

Anak perempuan menjadi orang yang paling dirugikan dalam pernikahan dini. Pertama,hak nya sebagai seorang anak terampas. Seorang anak yang menikah di usia dini mempunyai risiko kehamilan yang sangat besar. Selanjutnya, seorang anak perempuan yang menikah akan mengalami sejumlah persoalan psikologis seperti cemas, depresi, bahkan keinginan untuk bunuh diri. Di usia yang masih muda, anak-anak ini belum memiliki status dan kekuasaan di dalam masyarakat. Mereka masih terkungkung untuk mengontrol diri sendiri. Terakhir, pengetahuan seksualitas yang masih rendah meningkatkan risiko terkena penyakit infeksi menular seperti HIV.

2. Dampak bagi anak-anak hasil pernikahan dini

Risiko kesehatan tidak hanya berada pada pihak ibu tapi juga anak-anak yang nantinya lahir dari hubungan kedua orangtuanya yang menikah di bawah umur. Belum matangnya usia sang ibu, memberikan konsekuensi tertentu pada si calon anak. Misal, angka risiko kematian bayi lebih besar, bayi lahir dalam keadaan prematur, kurang gizi, dan anak berisiko terkena hambatan pertumbuhan atau *stunting*.

3. Dampak di masyarakat

Pernikahan dini juga juga dapat berdampak pada masyarakat luas, salah satunya garis kemiskinan yang berkelanjutan. Hal tersebut terjadi akibat pernikahan dini biasanya tidak dibarengi dengan tingginya tingkat pendidikan dan kemampuan finansial. Hal itu jelas akan berpengaruh besar terhadap cara didik orangtua yang belum matang secara usia kepada anak-anaknya. Pada akhirnya, berbuntut siklus kemiskinan yang berkelanjutan

Pernikahan dini kini menjadi barometer dari kemajuan pembangunan suatu daerah. Ketika angka pernikahan dini di suatu daerah kecil, maka dapat diyakini bahwa pemabngunan daerah berlangsung secara lancer dan menyeluruh.

Provinsi Sulawesi Barat memiliki persentasi pernikahan dini sebesar 19,4% angka ini melebihi persentase nasional yang sebesar 11,2%. Ketika diakses melalui website BPS untuk mengetahui angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dimiliki oleh Sulawasi Barat mencapai angka 65.1 . Angka ini menjadi paling kecil disbanding seluruh provinsi yang berada di Pulau Sulawesi. Hal ini cukup menunjukkan bahwa angka pernikahan dini

Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat	e ISSN : 2581-1126 p ISSN : 2442-448X	Vol 7, No: 1	Hal: 100 - 115	April 2020
---	--	--------------	----------------	------------

memang bias menjadi barometer dalam menunjukkan pemabangunan daerah.

Pembanguna daerah merupakan salah satu pendorong untuk mencapai pembangunan nasional. Untuk mencapai SDGs maka tiap-tiap tujuan harus dicapai dengan baik. Sayangnya, pernikahan dini merupakan contoh dari sulitnya untuk mencapaio hal tersebut.

Pernikahan dini merupakan cermin bagi daerah khususnya dalam bagaimana pemerintah bekerj untuk pembangunan daerah. Dalam tujuna SDG s, pernikahan dini merupakan bentuk tidak tercapainya dengan baik 5 tujuan dari SDGs yaitu kemiskinan, kelaparan, kesetaraan gender dan kesehatan.

Dilansir dari web National Geographic, ada 3 hal utama yang perlu diperhatikan untuk mengurangi angka pernikahan dini yang terjadidi Indonesia, 4 hal tersebut antara lain:

1. Menyediakan Pendidikan formal
2. Pendidikan Seks
3. Mendorong kesetaraan gender
4. Mengatasi tabu

Pendidikan menjadi faktor utama yang membantu penyelesaian masalah atas tingginya angka pernikahan dini di masyarakat. Edukasi mengenai pernikahan yang sebaiknya dilakukan oleh pada usia yang tepat harus dilakukan secara menyeluruh oleh setiap elemen masyarakat.

Perlu adanya kerja sama antara pemerintah dan setiap elemen masyarakat untuk menangani pernikahan dini. Karena, pernikahan dini dapat menjadi penunjuk bagaimana berjalannya pembanguna suatu daerah. Saat setiap masyarakat baik di desa maupun di kota Bersama dengan pemerintah daerah bekerja sama menaikkan pembangunan daerah maka masalah social dan kependudukan yang muncul akan berkurang dan pemerataan pembangunan akan meluas sehingga kesejahteraan masyarakat daerah akan tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

- Ainy, H. N. (2019). UBUNGAN ANTARA FERTILITAS, MORTALITAS, DAN MIGRASI DENGAN LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK. *Preventia: The Indonesian Journal of Public Health*, 4(1).
- Alaidrus, F. (2019, Desember 15). *Kok Bisa Batas Usia Pernikahan Naik tapi Perkawinan*

Anak Masih Ada? Retrieved from tirtto.id: <https://tirtto.id/kok-bisa-batas-usia-pernikahan-naik-tapi-perkawinan-anak-masih-ada-enmD>

- Ali, S. (2018). PERKAWINAN USIA MUDA di INDONESIA DALAM PERSPEKTIF NEGARA DAN AGAMA SERTA PERMASALAHANNYA (THE TEEN MARRIAGE IN INDONESIA ON THE COUNTRY PERSPECTIVE AND RELIGION AS WELL AS THE PROBLEM). *Jurnal Legislasi Indonesia*, 12(2).
- Azanella, L. A. (2018, September 5). *Ini Akibat yang Terjadi dari Pernikahan Dini.* Retrieved from Kompas.com: <https://lifestyle.kompas.com/read/2018/09/05/095311620/ini-akibat-yang-terjadi-dari-pernikahan-dini?page=all>
- Barat, B. P. (2010). *Sulawesi Barat dalam angka*. Indonesia: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat.
- BKKBN. (24, Mei 2019). *DAMPAK BESAR DAN PANJANG PERNIKAHAN DINI PADA PEREMPUAN*. Retrieved from BKKBN: <https://www.bkkbn.go.id/detailpost/dampak-besar-dan-panjang-pernikahan-dini-pada-perempuan>
- detikNews. (2014, November 10). *Dampak Pernikahan Dini: Kemiskinan, Kesehatan Bayi dan Rentan KDRT*. Retrieved from detiknews: <https://news.detik.com/berita/d-2744221/dampak-pernikahan-dini-kemiskinan-kesehatan-bayi-dan-rentan-kdrt>
- Fadlyana, E. &. (2016). Pernikahan usia dini dan permasalahannya. *Sari Pediatri*, 11(2), 36-41.
- Hapsari, O. P. (2019, September 18). *Masih Banyak Wanita Indonesia Nikah di Usia Dini*. Retrieved from Indonesia baik.id: <http://indonesiabaik.id/infografis/masih-banyak-wanita-indonesia-nikah-di-usia-dini>
- Heryanto. (2020, Februari 4). *Kementerian PPN Nilai Pernikahan Dini Tantangan Besar Pembangunan SDM, Kementerian PPPA: Perempuan Indonesia Menikah Dini*. Retrieved from Semarak.co: <http://semarak.co/kementerian-ppn-nilai-pernikahan-dini-tantangan-besar>

Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat	e ISSN : 2581-1126 p ISSN : 2442-448X	Vol 7, No: 1	Hal: 100 - 115	April 2020
---	--	--------------	----------------	------------

- pembangunan-sdm-kementerian-pppa-perempuan-indonesia-menikah-dini/
- Irdiana, N. (2019, Oktober 3). *3 Hal yang Perlu Dilakukan Indonesia untuk Mencegah Pernikahan Anak*. Retrieved from National Geographic Indonesia: <https://nationalgeographic.grid.id/read/131872209/3-hal-yang-perlu-dilakukan-indonesia-untuk-mencegah-pernikahan-anak?page=all>
- Koalisi 18+. (2017, November 6). *Perkawinan Anak Meningkat, Goal 5 SDGs Indonesia terkait Penghapusan Perkawinan Anak Indonesia di 2030 Terancam Gagal*. Retrieved from Pusat Keluarga Berencana Indonesia: <https://pkbi.or.id/perkawinan-anak-meningkat-goal-5-sdgs-indonesia-terkait-penghapusan-perkawinan-anak-indonesia-di-2030-terancam-gagal/>
- Kruglinski, J. (2019, Oktober 11). *Menolak Perkawinan Anak di Indonesia*. Retrieved from unicef Indonesia: <https://www.unicef.org/indonesia/id/stories/menolak-perkawinan-anak-di-indonesia>
- Lingkar.net. (2018, November 12). *Peraturan dan Hukum Melangsungkan Pernikahan Usia Dini*. Retrieved from Lingkar.net: <https://lingkar.net/peraturan-dan-hukum-melangsungkan-pernikahan-usia-dini/>
- Marhaeni, A. (2018). *Buku Pengantar Kependudukan Jilid 1*. Denpasar: CV. Sastra Utama.
- Mubasyaroh, M. (2016). Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi Pelakunya. *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 7(2), 385-411.
- Muntamah, A. L. (2019). *Pernikahan Dini Di Indonesia: Faktor Dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan Dan Perlindungan Hukum Bagi Anak)*. *Widya Yuridika*, 2(1), 1-12.
- Ningrum, H. M. (2015). *PENGARUH PERKAWINAN USIA MUDA TERHADAP POLA ASUH ANAK DI DESA PENUMANGAN BARU KECAMATAN TULANG BAWANG TENGAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT*. *Doctoral dissertation, FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK*.
- Pencegahan Perkawinan Anak. (2020).
- Sapriadi. (2019, Juli 18). *Masalah Kependudukan di Sulbar: Stunting dan Pernikahan Dini*. Retrieved from kumparan.com: <https://kumparan.com/sulbarkini/masalah-kependudukan-di-sulbar-stunting-dan-pernikahan-dini-1rUea2gcIA0/full>
- Statistik, B. P. (2014). *Kajian Indikator Sustainable Development Goals (SDGs)*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Sunaryanto, H. (2019). *NALISIS SOSIAL-EKONOMI FAKTOR PENYEBAB PERKAWINAN ANAK DI BENGKULU: DALAM PERSPEKTIF MASYARAKAT DAN PEMERINTAH (Studi Kasus di Kabupaten Seluma)*. *Jurnal Sosiologi Nusantara*, 5(1), 22-42.
- Surapaty, S. C. (1990). *EPENDUDUKAN: MENUJU SUATU ILMU KEMANUSIAAN TERPADU. Populasi*, 1(2).
- Susetyo, H. (2007). *Revisi Undang-Undang Perkawinan*. *Lex Jurnalica*, 17946.
- TATUHE, S. L. (2016). *PERANAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGENDALIAN PERTUMBUHAN PENDUDUK (Suatu Studi di Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Kepulauan Talaud)*. *JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK*, 1(37).
- Tay, D. S. (2019). *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN*. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 8(4), 217-222.
- Zahroh, F. (2015). *Analisis kritis terhadap hadis pernikahan dini antara 'Aisyah ra dengan Nabi Muhammad saw (perspektif sejarah sosial budaya)*. *Doctoral dissertation, UIN Walisongo*.
- Zahrok, U. (2016, December 9). *PERNIKAHAN DINI DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN*. Retrieved from HARIANterbit.CO: <https://harianterbit.co/2016/12/09/pernikahan-dini-dan-pembangunan-berkelanjutan/>